



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 977, 2020

KEMENKEU. Peta Kapasitas Fiskal Daerah.
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 120/PMK.07/2020

TENTANG

PETA KAPASITAS FISKAL DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
4. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1745);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PETA KAPASITAS FISKAL DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kapasitas Fiskal Daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu.
2. Peta Kapasitas Fiskal Daerah adalah gambaran kemampuan keuangan daerah yang dikelompokkan berdasarkan indeks kapasitas fiskal daerah.

BAB II

PETA KAPASITAS FISKAL DAERAH

Pasal 2

- (1) Peta Kapasitas Fiskal Daerah dapat digunakan untuk:
 - a. pertimbangan dalam penetapan daerah penerima hibah;
 - b. penentuan besaran dana pendamping oleh pemerintah daerah, jika dipersyaratkan; dan/atau

- c. penggunaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peta Kapasitas Fiskal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Peta Kapasitas Fiskal Daerah provinsi; dan
 - b. Peta Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota.
- (3) Peta Kapasitas Fiskal Daerah provinsi dan Peta Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

PENYUSUNAN PETA KAPASITAS FISKAL DAERAH

Pasal 3

- (1) Penyusunan Peta Kapasitas Fiskal Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dilakukan melalui 2 (dua) tahap, yaitu:
 - a. tahap I, penghitungan Kapasitas Fiskal Daerah provinsi; dan
 - b. tahap II, penghitungan indeks Kapasitas Fiskal Daerah provinsi.
- (2) Penyusunan Peta Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dilakukan melalui 2 (dua) tahap, yaitu:
 - a. tahap I, penghitungan Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota; dan
 - b. tahap II, penghitungan indeks Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota.

Pasal 4

- (1) Penghitungan Kapasitas Fiskal Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a didasarkan pada formula sebagai berikut:

$KFD_{provinsi-i}$ = pendapatan - [pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan + belanja tertentu]

Keterangan:

$KFD_{provinsi-i}$ = Kapasitas Fiskal Daerah suatu provinsi

- (2) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Pendapatan Asli Daerah;
 - b. Dana Perimbangan; dan
 - c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah.
- (3) Pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Pajak Rokok;
 - b. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
 - c. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Dana Reboisasi;
 - d. Dana Alokasi Khusus Fisik;
 - e. Dana Alokasi Khusus Nonfisik;
 - f. Dana Otonomi Khusus;
 - g. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Gas dalam rangka Otonomi Khusus; dan
 - h. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (4) Dana Alokasi Khusus Nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e tidak termasuk Dana Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- (5) Belanja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Bunga; dan
 - c. Belanja Bagi Hasil.

Pasal 5

- (1) Penghitungan indeks Kapasitas Fiskal Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b didasarkan pada formula sebagai berikut:

$$IKFD_{provinsi-i} = \frac{KFD_{provinsi-i}}{(\sum KFD_{provinsi})/n}$$

Keterangan:

$IKFD_{provinsi-i}$ = Indeks Kapasitas Fiskal Daerah suatu provinsi

$KFD_{provinsi-i}$ = Kapasitas Fiskal Daerah suatu provinsi

$\sum KFD_{provinsi}$ = Total Kapasitas Fiskal Daerah provinsi

n = 34 (tiga puluh empat) daerah provinsi

- (2) Berdasarkan indeks Kapasitas Fiskal Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), daerah provinsi dikelompokkan dalam 5 (lima) kategori Kapasitas Fiskal Daerah sebagai berikut:

Rentang IKFD	Kategori Kapasitas Fiskal Daerah
$IKFD < 0,277$	sangat rendah
$0,277 \leq IKFD < 0,564$	rendah
$0,564 \leq IKFD < 0,934$	sedang
$0,934 \leq IKFD < 1,920$	tinggi
$IKFD \geq 1,920$	sangat tinggi

Pasal 6

- (1) Penghitungan Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a didasarkan pada formula sebagai berikut:

$KFD_{kabupaten/kota-i}$ = pendapatan - [pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan + belanja tertentu]

Keterangan:

$KFD_{kabupaten/kota-i}$ = Kapasitas Fiskal Daerah suatu kabupaten/kota

- (2) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pendapatan Asli Daerah;
 - b. Dana Perimbangan; dan
 - c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah.
- (3) Pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;

- b. Dana Alokasi Khusus Fisik;
 - c. Dana Alokasi Khusus Nonfisik;
 - d. Dana Otonomi Khusus;
 - e. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Gas dalam rangka Otonomi Khusus; dan
 - f. Dana Desa.
- (4) Dana Alokasi Khusus Nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e tidak termasuk Dana Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- (5) Belanja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Bunga;
 - c. Belanja Bagi Hasil; dan
 - d. Alokasi Dana Desa.

Pasal 7

- (1) Penghitungan indeks Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b didasarkan pada formula sebagai berikut:

$$IKFD_{kabupaten/kota-i} = \frac{KFD_{kabupaten/kota-i}}{(\sum KFD_{kabupaten/kota})/n}$$

Keterangan:

$IKFD_{kabupaten/kota-i}$ = Indeks Kapasitas Fiskal Daerah suatu kabupaten/kota

$KFD_{kabupaten/kota-i}$ = Kapasitas Fiskal Daerah suatu kabupaten/kota

$\sum KFD_{kabupaten/kota}$ = Total Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota

n = 508 (lima ratus delapan) daerah kabupaten/kota

- (2) Berdasarkan indeks Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), daerah kabupaten/kota dikelompokkan dalam 5 (lima) kategori Kapasitas Fiskal Daerah sebagai berikut:

Rentang IKFD	Kategori Kapasitas Fiskal Daerah
$IKFD < 0,517$	sangat rendah
$0,517 \leq IKFD < 0,747$	rendah
$0,747 \leq IKFD < 1,168$	sedang
$1,168 \leq IKFD < 2,145$	tinggi
$IKFD \geq 2,145$	sangat tinggi

Pasal 8

Penghitungan Kapasitas Fiskal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 6 menggunakan data penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.07/2019 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 987), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Agustus 2020

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 September 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 120/PMK.07/2020
 TENTANG
 PETA KAPASITAS FISKAL DAERAH

A. PETA KAPASITAS FISKAL DAERAH PROVINSI

No.	Nama Daerah	Indeks KFD	Kategori KFD
1	Prov. Aceh	0,220	Sangat Rendah
2	Prov. Sumatera Utara	1,115	Tinggi
3	Prov. Sumatera Barat	0,594	Sedang
4	Prov. Riau	1,016	Tinggi
5	Prov. Jambi	0,357	Rendah
6	Prov. Sumatera Selatan	0,948	Tinggi
7	Prov. Bengkulu	0,249	Sangat Rendah
8	Prov. Lampung	0,678	Sedang
9	Prov. DKI Jakarta	6,207	Sangat Tinggi
10	Prov. Jawa Barat	4,676	Sangat Tinggi
11	Prov. Jawa Tengah	2,943	Sangat Tinggi
12	Prov. DI Yogyakarta	0,390	Rendah
13	Prov. Jawa Timur	2,885	Sangat Tinggi
14	Prov. Kalimantan Barat	0,685	Sedang
15	Prov. Kalimantan Tengah	0,776	Sedang
16	Prov. Kalimantan Selatan	0,891	Sedang
17	Prov. Kalimantan Timur	1,472	Tinggi
18	Prov. Sulawesi Utara	0,504	Rendah
19	Prov. Sulawesi Tengah	0,406	Rendah
20	Prov. Sulawesi Selatan	0,799	Sedang
21	Prov. Sulawesi Tenggara	0,389	Rendah
22	Prov. Bali	0,533	Rendah
23	Prov. Nusa Tenggara Barat	0,318	Rendah
24	Prov. Nusa Tenggara Timur	0,786	Sedang
25	Prov. Maluku	0,189	Sangat Rendah
26	Prov. Papua	1,616	Tinggi
27	Prov. Maluku Utara	0,215	Sangat Rendah
28	Prov. Banten	0,847	Sedang
29	Prov. Bangka Belitung	0,223	Sangat Rendah

No.	Nama Daerah	Indeks KFD	Kategori KFD
30	Prov. Gorontalo	0,103	Sangat Rendah
31	Prov. Kepulauan Riau	0,244	Sangat Rendah
32	Prov. Papua Barat	0,156	Sangat Rendah
33	Prov. Sulawesi Barat	0,269	Sangat Rendah
34	Prov. Kalimantan Utara	0,302	Rendah

B. PETA KAPASITAS FISKAL DAERAH KABUPATEN/KOTA

No.	Nama Daerah	Indeks KFD	Kategori KFD
1	Kab. Aceh Barat	0,944	Sedang
2	Kab. Aceh Besar	1,596	Tinggi
3	Kab. Aceh Selatan	0,029	Sangat Rendah
4	Kab. Aceh Singkil	0,567	Rendah
5	Kab. Aceh Tengah	0,440	Sangat Rendah
6	Kab. Aceh Tenggara	0,350	Sangat Rendah
7	Kab. Aceh Timur	0,185	Sangat Rendah
8	Kab. Aceh Utara	1,817	Tinggi
9	Kab. Bireuen	1,477	Tinggi
10	Kab. Pidie	0,558	Rendah
11	Kab. Simeulue	0,317	Sangat Rendah
12	Kota Banda Aceh	0,742	Rendah
13	Kota Sabang	0,403	Sangat Rendah
14	Kota Langsa	0,351	Sangat Rendah
15	Kota Lhokseumawe	0,475	Sangat Rendah
16	Kab. Gayo Lues	0,365	Sangat Rendah
17	Kab. Aceh Barat Daya	0,414	Sangat Rendah
18	Kab. Aceh Jaya	0,264	Sangat Rendah
19	Kab. Nagan Raya	0,482	Sangat Rendah
20	Kab. Aceh Tamiang	0,204	Sangat Rendah
21	Kab. Bener Meriah	0,032	Sangat Rendah
22	Kab. Pidie Jaya	0,943	Sedang
23	Kota Subulussalam	0,324	Sangat Rendah
24	Kab. Asahan	0,856	Sedang
25	Kab. Dairi	0,494	Sangat Rendah
26	Kab. Deli Serdang	1,805	Tinggi
27	Kab. Karo	0,338	Sangat Rendah
28	Kab. Labuhanbatu	0,773	Sedang
29	Kab. Langkat	1,162	Sedang
30	Kab. Mandailing Natal	0,585	Rendah
31	Kab. Nias	0,339	Sangat Rendah
32	Kab. Simalungun	1,235	Tinggi
33	Kab. Tapanuli Selatan	0,829	Sedang
34	Kab. Tapanuli Tengah	0,542	Rendah
35	Kab. Tapanuli Utara	0,589	Rendah

No.	Nama Daerah	Indeks KFD	Kategori KFD
36	Kab. Toba Samosir	0,408	Sangat Rendah
37	Kota Binjai	0,486	Sangat Rendah
38	Kota Medan	3,384	Sangat Tinggi
39	Kota Pematang Siantar	0,329	Sangat Rendah
40	Kota Sibolga	0,536	Rendah
41	Kota Tanjung Balai	0,349	Sangat Rendah
42	Kota Tebing Tinggi	0,533	Rendah
43	Kota Padang Sidempuan	0,382	Sangat Rendah
44	Kab. Pakpak Bharat	0,305	Sangat Rendah
45	Kab. Nias Selatan	0,631	Rendah
46	Kab. Humbang Hasundutan	0,421	Sangat Rendah
47	Kab. Serdang Bedagai	0,631	Rendah
48	Kab. Samosir	0,385	Sangat Rendah
49	Kab. Batu Bara	0,723	Rendah
50	Kab. Padang Lawas	0,916	Sedang
51	Kab. Padang Lawas Utara	0,510	Sangat Rendah
52	Kab. Labuhanbatu Selatan	0,599	Rendah
53	Kab. Labuhanbatu Utara	0,588	Rendah
54	Kab. Nias Utara	0,393	Sangat Rendah
55	Kab. Nias Barat	0,284	Sangat Rendah
56	Kota Gunungsitoli	0,400	Sangat Rendah
57	Kab. Limapuluh Kota	0,499	Sangat Rendah
58	Kab. Agam	0,853	Sedang
59	Kab. Kepulauan Mentawai	0,415	Sangat Rendah
60	Kab. Padang Pariaman	0,581	Rendah
61	Kab. Pasaman	0,699	Rendah
62	Kab. Pesisir Selatan	0,780	Sedang
63	Kab. Sijunjung	0,425	Sangat Rendah
64	Kab. Solok	1,590	Tinggi
65	Kab. Tanah Datar	0,742	Rendah
66	Kota Bukittinggi	0,538	Rendah
67	Kota Padang Panjang	0,477	Sangat Rendah
68	Kota Padang	1,812	Tinggi
69	Kota Payakumbuh	0,613	Rendah
70	Kota Sawahlunto	0,303	Sangat Rendah
71	Kota Solok	0,388	Sangat Rendah

No.	Nama Daerah	Indeks KFD	Kategori KFD
72	Kota Pariaman	0,544	Rendah
73	Kab. Pasaman Barat	0,517	Rendah
74	Kab. Dharmasraya	0,540	Rendah
75	Kab. Solok Selatan	0,396	Sangat Rendah
76	Kab. Bengkalis	2,635	Sangat Tinggi
77	Kab. Indragiri Hilir	1,180	Tinggi
78	Kab. Indragiri Hulu	0,800	Sedang
79	Kab. Kampar	1,671	Tinggi
80	Kab. Kuantan Singingi	0,869	Sedang
81	Kab. Pelalawan	1,361	Tinggi
82	Kab. Rokan Hilir	1,576	Tinggi
83	Kab. Rokan Hulu	0,907	Sedang
84	Kab. Siak	1,352	Tinggi
85	Kota Dumai	0,897	Sedang
86	Kota Pekanbaru	2,356	Sangat Tinggi
87	Kab. Kepulauan Meranti	0,909	Sedang
88	Kab. Batanghari	0,987	Sedang
89	Kab. Bungo	0,661	Rendah
90	Kab. Kerinci	1,035	Sedang
91	Kab. Merangin	0,562	Rendah
92	Kab. Muaro Jambi	0,978	Sedang
93	Kab. Sarolangun	0,571	Rendah
94	Kab. Tanjung Jabung Barat	0,825	Sedang
95	Kab. Tanjung Jabung Timur	0,725	Rendah
96	Kab. Tebo	0,657	Rendah
97	Kota Jambi	1,285	Tinggi
98	Kota Sungai Penuh	0,477	Sangat Rendah
99	Kab. Lahat	1,041	Sedang
100	Kab. Musi Banyuasin	2,140	Tinggi
101	Kab. Musi Rawas	1,495	Tinggi
102	Kab. Muara Enim	1,892	Tinggi
103	Kab. Ogan Komering Ilir	1,728	Tinggi
104	Kab. Ogan Komering Ulu	0,791	Sedang
105	Kota Palembang	2,887	Sangat Tinggi
106	Kota Prabumulih	0,562	Rendah
107	Kota Pagar Alam	0,578	Rendah

No.	Nama Daerah	Indeks KFD	Kategori KFD
108	Kota Lubuk Linggau	0,819	Sedang
109	Kab. Banyuasin	1,870	Tinggi
110	Kab. Ogan Ilir	1,218	Tinggi
111	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	1,011	Sedang
112	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	0,841	Sedang
113	Kab. Empat Lawang	0,617	Rendah
114	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	1,454	Tinggi
115	Kab. Musi Rawas Utara	0,937	Sedang
116	Kab. Bengkulu Selatan	1,674	Tinggi
117	Kab. Bengkulu Utara	0,912	Sedang
118	Kab. Rejang Lebong	0,588	Rendah
119	Kota Bengkulu	0,807	Sedang
120	Kab. Kaur	0,609	Rendah
121	Kab. Seluma	0,573	Rendah
122	Kab. Mukomuko	0,424	Sangat Rendah
123	Kab. Lebong	0,483	Sangat Rendah
124	Kab. Kepahiang	0,265	Sangat Rendah
125	Kab. Bengkulu Tengah	0,217	Sangat Rendah
126	Kab. Lampung Barat	0,692	Rendah
127	Kab. Lampung Selatan	0,989	Sedang
128	Kab. Lampung Tengah	0,877	Sedang
129	Kab. Lampung Utara	0,667	Rendah
130	Kab. Lampung Timur	1,612	Tinggi
131	Kab. Tanggamus	0,691	Rendah
132	Kab. Tulang Bawang	0,563	Rendah
133	Kab. Way Kanan	0,563	Rendah
134	Kota Bandar Lampung	2,518	Sangat Tinggi
135	Kota Metro	0,729	Rendah
136	Kab. Pesawaran	0,507	Sangat Rendah
137	Kab. Pringsewu	0,921	Sedang
138	Kab. Mesuji	0,367	Sangat Rendah
139	Kab. Tulang Bawang Barat	0,434	Sangat Rendah
140	Kab. Pesisir Barat	0,694	Rendah
141	Kab. Bandung	2,641	Sangat Tinggi
142	Kab. Bekasi	4,686	Sangat Tinggi
143	Kab. Bogor	4,343	Sangat Tinggi

No.	Nama Daerah	Indeks KFD	Kategori KFD
144	Kab. Ciamis	1,069	Sedang
145	Kab. Cianjur	2,808	Sangat Tinggi
146	Kab. Cirebon	1,877	Tinggi
147	Kab. Garut	2,384	Sangat Tinggi
148	Kab. Indramayu	2,186	Sangat Tinggi
149	Kab. Karawang	2,104	Tinggi
150	Kab. Kuningan	1,532	Tinggi
151	Kab. Majalengka	2,364	Sangat Tinggi
152	Kab. Purwakarta	1,438	Tinggi
153	Kab. Subang	2,207	Sangat Tinggi
154	Kab. Sukabumi	2,585	Sangat Tinggi
155	Kab. Sumedang	1,151	Sedang
156	Kab. Tasikmalaya	1,427	Tinggi
157	Kota Bandung	4,726	Sangat Tinggi
158	Kota Bekasi	5,873	Sangat Tinggi
159	Kota Bogor	1,168	Tinggi
160	Kota Cirebon	1,381	Tinggi
161	Kota Depok	2,521	Sangat Tinggi
162	Kota Sukabumi	0,969	Sedang
163	Kota Tasikmalaya	0,881	Sedang
164	Kota Cimahi	0,942	Sedang
165	Kota Banjar	0,698	Rendah
166	Kab. Bandung Barat	1,910	Tinggi
167	Kab. Pangandaran	0,598	Rendah
168	Kab. Banjarnegara	1,529	Tinggi
169	Kab. Banyumas	2,080	Tinggi
170	Kab. Batang	1,332	Tinggi
171	Kab. Blora	1,118	Sedang
172	Kab. Boyolali	1,464	Tinggi
173	Kab. Brebes	1,658	Tinggi
174	Kab. Cilacap	1,725	Tinggi
175	Kab. Demak	1,753	Tinggi
176	Kab. Grobogan	2,053	Tinggi
177	Kab. Jepara	1,125	Sedang
178	Kab. Karanganyar	1,295	Tinggi
179	Kab. Kebumen	1,292	Tinggi

No.	Nama Daerah	Indeks KFD	Kategori KFD
180	Kab. Kendal	0,733	Rendah
181	Kab. Klaten	1,238	Tinggi
182	Kab. Kudus	0,613	Rendah
183	Kab. Magelang	1,117	Sedang
184	Kab. Pati	1,880	Tinggi
185	Kab. Pekalongan	1,017	Sedang
186	Kab. Pemalang	1,330	Tinggi
187	Kab. Purbalingga	0,869	Sedang
188	Kab. Purworejo	1,029	Sedang
189	Kab. Rembang	1,287	Tinggi
190	Kab. Semarang	3,316	Sangat Tinggi
191	Kab. Sragen	1,140	Sedang
192	Kab. Sukoharjo	1,544	Tinggi
193	Kab. Tegal	1,502	Tinggi
194	Kab. Temanggung	0,800	Sedang
195	Kab. Wonogiri	0,814	Sedang
196	Kab. Wonosobo	1,150	Sedang
197	Kota Magelang	0,802	Sedang
198	Kota Pekalongan	0,646	Rendah
199	Kota Salatiga	0,813	Sedang
200	Kota Semarang	4,146	Sangat Tinggi
201	Kota Surakarta	1,492	Tinggi
202	Kota Tegal	0,744	Rendah
203	Kab. Bantul	1,167	Sedang
204	Kab. Gunung Kidul	1,760	Tinggi
205	Kab. Kulonprogo	0,730	Rendah
206	Kab. Sleman	1,830	Tinggi
207	Kota Yogyakarta	1,302	Tinggi
208	Kab. Bangkalan	0,750	Sedang
209	Kab. Banyuwangi	2,161	Sangat Tinggi
210	Kab. Blitar	1,431	Tinggi
211	Kab. Bojonegoro	2,531	Sangat Tinggi
212	Kab. Bondowoso	0,922	Sedang
213	Kab. Gresik	2,348	Sangat Tinggi
214	Kab. Jember	2,155	Sangat Tinggi
215	Kab. Jombang	1,238	Tinggi

No.	Nama Daerah	Indeks KFD	Kategori KFD
216	Kab. Kediri	1,570	Tinggi
217	Kab. Lamongan	1,437	Tinggi
218	Kab. Lumajang	1,533	Tinggi
219	Kab. Madiun	0,710	Rendah
220	Kab. Magetan	0,868	Sedang
221	Kab. Malang	1,635	Tinggi
222	Kab. Mojokerto	1,486	Tinggi
223	Kab. Nganjuk	0,702	Rendah
224	Kab. Ngawi	1,040	Sedang
225	Kab. Pacitan	1,167	Sedang
226	Kab. Pamekasan	0,866	Sedang
227	Kab. Pasuruan	2,608	Sangat Tinggi
228	Kab. Ponorogo	1,192	Tinggi
229	Kab. Probolinggo	1,914	Tinggi
230	Kab. Sampang	0,981	Sedang
231	Kab. Sidoarjo	2,960	Sangat Tinggi
232	Kab. Situbondo	0,815	Sedang
233	Kab. Sumenep	0,941	Sedang
234	Kab. Trenggalek	0,785	Sedang
235	Kab. Tuban	1,568	Tinggi
236	Kab. Tulungagung	1,165	Sedang
237	Kota Blitar	0,823	Sedang
238	Kota Kediri	0,680	Rendah
239	Kota Madiun	0,951	Sedang
240	Kota Malang	1,345	Tinggi
241	Kota Mojokerto	0,780	Sedang
242	Kota Pasuruan	0,492	Sangat Rendah
243	Kota Probolinggo	0,984	Sedang
244	Kota Surabaya	7,676	Sangat Tinggi
245	Kota Batu	0,698	Rendah
246	Kab. Bengkayang	0,414	Sangat Rendah
247	Kab. Landak	0,753	Sedang
248	Kab. Kapuas Hulu	0,821	Sedang
249	Kab. Ketapang	0,922	Sedang
250	Kab. Mempawah	0,560	Rendah
251	Kab. Sambas	0,898	Sedang

No.	Nama Daerah	Indeks KFD	Kategori KFD
252	Kab. Sanggau	1,035	Sedang
253	Kab. Sintang	1,563	Tinggi
254	Kota Pontianak	0,821	Sedang
255	Kota Singkawang	0,471	Sangat Rendah
256	Kab. Sekadau	0,860	Sedang
257	Kab. Melawi	0,587	Rendah
258	Kab. Kayong Utara	0,617	Rendah
259	Kab. Kubu Raya	0,985	Sedang
260	Kab. Barito Selatan	0,739	Rendah
261	Kab. Barito Utara	0,538	Rendah
262	Kab. Kapuas	1,275	Tinggi
263	Kab. Kotawaringin Barat	1,572	Tinggi
264	Kab. Kotawaringin Timur	1,033	Sedang
265	Kota Palangka Raya	0,796	Sedang
266	Kab. Katingan	0,643	Rendah
267	Kab. Seruyan	0,737	Rendah
268	Kab. Sukamara	0,440	Sangat Rendah
269	Kab. Lamandau	0,490	Sangat Rendah
270	Kab. Gunung Mas	1,124	Sedang
271	Kab. Pulang Pisau	0,534	Rendah
272	Kab. Murung Raya	0,879	Sedang
273	Kab. Barito Timur	0,512	Sangat Rendah
274	Kab. Banjar	1,129	Sedang
275	Kab. Barito Kuala	1,075	Sedang
276	Kab. Hulu Sungai Selatan	0,568	Rendah
277	Kab. Hulu Sungai Tengah	0,754	Sedang
278	Kab. Hulu Sungai Utara	1,024	Sedang
279	Kab. Kotabaru	0,793	Sedang
280	Kab. Tabalong	0,846	Sedang
281	Kab. Tanah Laut	0,824	Sedang
282	Kab. Tapin	1,169	Tinggi
283	Kota Banjarbaru	1,112	Sedang
284	Kota Banjarmasin	1,688	Tinggi
285	Kab. Balangan	1,156	Sedang
286	Kab. Tanah Bumbu	1,552	Tinggi
287	Kab. Berau	1,554	Tinggi

No.	Nama Daerah	Indeks KFD	Kategori KFD
288	Kab. Kutai Kartanegara	2,642	Sangat Tinggi
289	Kab. Kutai Barat	2,627	Sangat Tinggi
290	Kab. Kutai Timur	2,489	Sangat Tinggi
291	Kab. Paser	1,762	Tinggi
292	Kota Balikpapan	2,697	Sangat Tinggi
293	Kota Bontang	1,289	Tinggi
294	Kota Samarinda	1,490	Tinggi
295	Kab. Penajam Paser Utara	1,914	Tinggi
296	Kab. Mahakam Ulu	1,159	Sedang
297	Kab. Bolaang Mongondow	0,539	Rendah
298	Kab. Minahasa	0,582	Rendah
299	Kab. Kepulauan Sangihe	0,411	Sangat Rendah
300	Kota Bitung	0,641	Rendah
301	Kota Manado	1,289	Tinggi
302	Kab. Kepulauan Talaud	0,394	Sangat Rendah
303	Kab. Minahasa Selatan	0,480	Sangat Rendah
304	Kota Tomohon	0,522	Rendah
305	Kab. Minahasa Utara	0,616	Rendah
306	Kota Kotamobagu	0,514	Sangat Rendah
307	Kab. Minahasa Tenggara	0,719	Rendah
308	Kab. Bolaang Mongondow Utara	0,444	Sangat Rendah
309	Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	0,375	Sangat Rendah
310	Kab. Bolaang Mongondow Timur	0,491	Sangat Rendah
311	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	0,377	Sangat Rendah
312	Kab. Banggai	0,743	Rendah
313	Kab. Banggai Kepulauan	0,257	Sangat Rendah
314	Kab. Buol	0,458	Sangat Rendah
315	Kab. Toli-Toli	0,590	Rendah
316	Kab. Donggala	0,721	Rendah
317	Kab. Morowali	0,693	Rendah
318	Kab. Poso	0,440	Sangat Rendah
319	Kota Palu	2,718	Sangat Tinggi
320	Kab. Parigi Moutong	0,569	Rendah
321	Kab. Tojo Una-una	0,698	Rendah
322	Kab. Sigi	0,447	Sangat Rendah

No.	Nama Daerah	Indeks KFD	Kategori KFD
323	Kab. Banggai Laut	0,336	Sangat Rendah
324	Kab. Morowali Utara	0,485	Sangat Rendah
325	Kab. Bantaeng	0,708	Rendah
326	Kab. Barru	0,365	Sangat Rendah
327	Kab. Bone	1,187	Tinggi
328	Kab. Bulukumba	1,018	Sedang
329	Kab. Enrekang	0,645	Rendah
330	Kab. Gowa	0,999	Sedang
331	Kab. Jeneponto	0,666	Rendah
332	Kab. Luwu	1,034	Sedang
333	Kab. Luwu Utara	0,666	Rendah
334	Kab. Maros	0,811	Sedang
335	Kab. Pangkajene dan Kepulauan	0,733	Rendah
336	Kab. Pinrang	0,659	Rendah
337	Kab. Kepulauan Selayar	0,653	Rendah
338	Kab. Sidenreng Rappang	1,844	Tinggi
339	Kab. Sinjai	0,940	Sedang
340	Kab. Soppeng	0,498	Sangat Rendah
341	Kab. Takalar	0,454	Sangat Rendah
342	Kab. Tana Toraja	0,640	Rendah
343	Kab. Wajo	0,730	Rendah
344	Kota Parepare	0,711	Rendah
345	Kota Makassar	3,658	Sangat Tinggi
346	Kota Palopo	0,483	Sangat Rendah
347	Kab. Luwu Timur	1,127	Sedang
348	Kab. Toraja Utara	0,752	Sedang
349	Kab. Buton	0,368	Sangat Rendah
350	Kab. Konawe	1,770	Tinggi
351	Kab. Kolaka	0,841	Sedang
352	Kab. Muna	0,385	Sangat Rendah
353	Kota Kendari	1,141	Sedang
354	Kota Bau-Bau	0,607	Rendah
355	Kab. Konawe Selatan	0,677	Rendah
356	Kab. Bombana	0,476	Sangat Rendah
357	Kab. Wakatobi	0,452	Sangat Rendah
358	Kab. Kolaka Utara	0,365	Sangat Rendah

No.	Nama Daerah	Indeks KFD	Kategori KFD
359	Kab. Konawe Utara	0,514	Sangat Rendah
360	Kab. Buton Utara	0,398	Sangat Rendah
361	Kab. Kolaka Timur	0,544	Rendah
362	Kab. Konawe Kepulauan	0,366	Sangat Rendah
363	Kab. Muna Barat	0,392	Sangat Rendah
364	Kab. Buton Tengah	0,310	Sangat Rendah
365	Kab. Buton Selatan	0,373	Sangat Rendah
366	Kab. Badung	4,880	Sangat Tinggi
367	Kab. Bangli	0,565	Rendah
368	Kab. Buleleng	1,425	Tinggi
369	Kab. Gianyar	1,742	Tinggi
370	Kab. Jembrana	0,949	Sedang
371	Kab. Karangasem	0,766	Sedang
372	Kab. Klungkung	0,784	Sedang
373	Kab. Tabanan	0,649	Rendah
374	Kota Denpasar	0,719	Rendah
375	Kab. Bima	0,629	Rendah
376	Kab. Dompu	0,639	Rendah
377	Kab. Lombok Barat	0,929	Sedang
378	Kab. Lombok Tengah	1,050	Sedang
379	Kab. Lombok Timur	1,649	Tinggi
380	Kab. Sumbawa	0,806	Sedang
381	Kota Mataram	1,178	Tinggi
382	Kota Bima	0,405	Sangat Rendah
383	Kab. Sumbawa Barat	0,649	Rendah
384	Kab. Lombok Utara	0,561	Rendah
385	Kab. Alor	0,430	Sangat Rendah
386	Kab. Belu	0,946	Sedang
387	Kab. Ende	0,353	Sangat Rendah
388	Kab. Flores Timur	0,423	Sangat Rendah
389	Kab. Kupang	0,683	Rendah
390	Kab. Lembata	0,298	Sangat Rendah
391	Kab. Manggarai	0,541	Rendah
392	Kab. Ngada	0,515	Sangat Rendah
393	Kab. Sikka	0,682	Rendah
394	Kab. Sumba Barat	0,314	Sangat Rendah

No.	Nama Daerah	Indeks KFD	Kategori KFD
395	Kab. Sumba Timur	0,573	Rendah
396	Kab. Timor Tengah Selatan	1,085	Sedang
397	Kab. Timor Tengah Utara	0,472	Sangat Rendah
398	Kota Kupang	0,631	Rendah
399	Kab. Rote Ndao	0,302	Sangat Rendah
400	Kab. Manggarai Barat	0,517	Rendah
401	Kab. Nagekeo	0,332	Sangat Rendah
402	Kab. Sumba Tengah	0,321	Sangat Rendah
403	Kab. Sumba Barat Daya	0,397	Sangat Rendah
404	Kab. Manggarai Timur	0,736	Rendah
405	Kab. Sabu Raijua	0,449	Sangat Rendah
406	Kab. Malaka	0,322	Sangat Rendah
407	Kab. Kepulauan Tanimbar	0,694	Rendah
408	Kab. Maluku Tengah	0,951	Sedang
409	Kab. Maluku Tenggara	0,705	Rendah
410	Kab. Buru	0,491	Sangat Rendah
411	Kota Ambon	0,999	Sedang
412	Kab. Seram Bagian Barat	0,600	Rendah
413	Kab. Seram Bagian Timur	0,973	Sedang
414	Kab. Kepulauan Aru	0,719	Rendah
415	Kota Tual	0,519	Rendah
416	Kab. Maluku Barat Daya	0,751	Sedang
417	Kab. Buru Selatan	0,455	Sangat Rendah
418	Kab. Biak Numfor	0,804	Sedang
419	Kab. Jayapura	0,570	Rendah
420	Kab. Jayawijaya	0,690	Rendah
421	Kab. Merauke	1,517	Tinggi
422	Kab. Mimika	2,000	Tinggi
423	Kab. Nabire	0,410	Sangat Rendah
424	Kab. Paniai	0,476	Sangat Rendah
425	Kab. Puncak Jaya	1,265	Tinggi
426	Kab. Kepulauan Yapen	1,177	Tinggi
427	Kota Jayapura	0,687	Rendah
428	Kab. Sarmi	0,658	Rendah
429	Kab. Keerom	0,652	Rendah
430	Kab. Yahukimo	1,363	Tinggi

No.	Nama Daerah	Indeks KFD	Kategori KFD
431	Kab. Pegunungan Bintang	0,639	Rendah
432	Kab. Tolikara	1,394	Tinggi
433	Kab. Boven Digoel	1,142	Sedang
434	Kab. Mappi	0,627	Rendah
435	Kab. Asmat	0,122	Sangat Rendah
436	Kab. Waropen	0,644	Rendah
437	Kab. Supiori	0,338	Sangat Rendah
438	Kab. Mamberamo Raya	0,888	Sedang
439	Kab. Mamberamo Tengah	0,521	Rendah
440	Kab. Yalimo	0,674	Rendah
441	Kab. Lanny Jaya	0,744	Rendah
442	Kab. Nduga	0,847	Sedang
443	Kab. Puncak	0,698	Rendah
444	Kab. Dogiyai	0,582	Rendah
445	Kab. Intan Jaya	0,977	Sedang
446	Kab. Deiyai	0,435	Sangat Rendah
447	Kab. Halmahera Tengah	0,892	Sedang
448	Kota Ternate	0,710	Rendah
449	Kab. Halmahera Barat	0,446	Sangat Rendah
450	Kab. Halmahera Timur	0,767	Sedang
451	Kab. Halmahera Selatan	0,895	Sedang
452	Kab. Halmahera Utara	0,984	Sedang
453	Kab. Kepulauan Sula	0,346	Sangat Rendah
454	Kota Tidore Kepulauan	0,441	Sangat Rendah
455	Kab. Pulau Morotai	0,345	Sangat Rendah
456	Kab. Pulau Taliabu	0,543	Rendah
457	Kab. Lebak	1,502	Tinggi
458	Kab. Pandeglang	0,970	Sedang
459	Kab. Serang	2,442	Sangat Tinggi
460	Kab. Tangerang	7,509	Sangat Tinggi
461	Kota Cilegon	1,086	Sedang
462	Kota Tangerang	1,899	Tinggi
463	Kota Serang	1,191	Tinggi
464	Kota Tangerang Selatan	3,231	Sangat Tinggi
465	Kab. Bangka	0,359	Sangat Rendah
466	Kab. Belitung	0,379	Sangat Rendah

No.	Nama Daerah	Indeks KFD	Kategori KFD
467	Kota Pangkal Pinang	0,774	Sedang
468	Kab. Bangka Selatan	0,538	Rendah
469	Kab. Bangka Tengah	0,466	Sangat Rendah
470	Kab. Bangka Barat	0,259	Sangat Rendah
471	Kab. Belitung Timur	0,046	Sangat Rendah
472	Kab. Boalemo	0,347	Sangat Rendah
473	Kab. Gorontalo	1,567	Tinggi
474	Kota Gorontalo	0,780	Sedang
475	Kab. Pohuwato	0,568	Rendah
476	Kab. Bone Bolango	0,469	Sangat Rendah
477	Kab. Gorontalo Utara	0,307	Sangat Rendah
478	Kab. Karimun	0,459	Sangat Rendah
479	Kab. Bintan	0,809	Sedang
480	Kab. Natuna	0,428	Sangat Rendah
481	Kota Batam	2,781	Sangat Tinggi
482	Kota Tanjung Pinang	0,819	Sedang
483	Kab. Lingga	0,659	Rendah
484	Kab. Kepulauan Anambas	0,558	Rendah
485	Kab. Fakfak	0,661	Rendah
486	Kab. Manokwari	0,470	Sangat Rendah
487	Kab. Sorong	0,242	Sangat Rendah
488	Kota Sorong	0,304	Sangat Rendah
489	Kab. Raja Ampat	0,851	Sedang
490	Kab. Sorong Selatan	0,346	Sangat Rendah
491	Kab. Teluk Bintuni	1,511	Tinggi
492	Kab. Teluk Wondama	0,553	Rendah
493	Kab. Kaimana	0,829	Sedang
494	Kab. Tambrauw	0,483	Sangat Rendah
495	Kab. Maybrat	0,753	Sedang
496	Kab. Manokwari Selatan	0,272	Sangat Rendah
497	Kab. Pegunungan Arfak	0,358	Sangat Rendah
498	Kab. Majene	0,416	Sangat Rendah
499	Kab. Mamuju	0,554	Rendah
500	Kab. Polewali Mandar	0,645	Rendah
501	Kab. Mamasa	0,420	Sangat Rendah
502	Kab. Pasangkayu	0,623	Rendah

No.	Nama Daerah	Indeks KFD	Kategori KFD
503	Kab. Mamuju Tengah	0,423	Sangat Rendah
504	Kab. Bulungan	0,779	Sedang
505	Kab. Malinau	0,836	Sedang
506	Kab. Nunukan	0,876	Sedang
507	Kota Tarakan	0,692	Rendah
508	Kab. Tana Tidung	0,515	Sangat Rendah

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI